

# Globalisasi di Negara Sekretif: *VOA Burmese* dan Demokrasi di Myanmar

I Made Adhi Pratama<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Email: made.adhi@gmail.com

## ABSTRACT

*Democracy has successfully promoted to international community through the process of Globalization. One of the process could be conducted through information transfer. International media known with its ability to set a certain agenda, while also enhance with the ability to multiply information. VOA Burmese as an international source of news intrinsively involved in spreading the value of democracy in one of the most secretive nation, Myanmar. Through the exposure of uncensored information, VOA Burmese has influenced the people of Myanmar on the issue of democracy and information transparency. Moreover, VOA Burmese has contributed in raising the awareness of democratic movement to the people of Myanmar. In this article, the author aims to describe the role of VOA Burmese in the democratization process of Myanmar, in 2000-2012.*

**Kata kunci:** VOA, Globalisasi, Myanmar, Demokrasi

## PENDAHULUAN: MEDIA DI MYANMAR & EKSTISTENSI *VOA BURMESE*

Pasal 19 pada Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia (DUHAM) secara jelas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pasal ini juga menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari intervensi dalam hak kebebasan berpendapat mereka, serta berhak untuk menerima

informasi tanpa batasan dari pihak manapun. Ketika hak ini dinikmati oleh sebagian negara di dunia, masih banyak negara yang penduduknya tidak dapat menggunakan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Salah satu negara yang mengalami hal tersebut ialah Myanmar. Sejak mengalami kudeta pada tahun 1962, pemerintah junta Myanmar berusaha untuk membatasi dan melarang informasi-informasi yang berkaitan

dengan gerakan anti pemerintah. Junta militer Myanmar juga berusaha untuk menutup-nutupi berbagai informasi yang tersedia dari luar negara Myanmar, dan menyebarkan informasi propaganda yang masif sebagai satu-satunya *proxy* informasi untuk masyarakat Myanmar.

Para pekerja media di Myanmar telah berusaha untuk menjaga kebebasan informasi pasca kudeta militer 1962 dengan membentuk *Burma Press Council*. Namun, satu bulan setelah pembentukan organisasi tersebut, junta militer Myanmar menutup *Burma Press Council* dan menangkap beberapa jurnalis. Junta militer juga menutup beberapa penerbitan dan membatasi jumlah surat kabar yang terbit dari yang sebelumnya berjumlah 30 menjadi tinggal 8 surat kabar (Smith, 1991).

Media di Myanmar kemudian menjadi lahan monopoli semenjak pemerintahan berada di bawah kendali Ne Win, yang juga pada saat itu memimpin kudeta militer 1962. Media di Myanmar dikontrol sangat ketat oleh junta militer, jurnalis yang bertugas di Myanmar seringkali dianiaya dan dihukum secara tidak adil oleh otoritas yang

berwenang<sup>1</sup>. Berbagai undang-undang dibuat oleh pemerintahan junta untuk membatasi gerak media di Myanmar, dan memanfaatkan secara luas ruang kendali editorial oleh pemerintahan junta. Salah satu undang-undang (UU) yang dibuat ialah *Printers and Publishers Registration Law*. UU yang dibuat pada tahun 1962 ini mengharuskan semua penerbit untuk mengirimkan semua dokumen terbitan mereka kepada pemerintah sebelum dipublikasikan ke publik<sup>2</sup>. UU lain seperti *The Computer Science Development Law* yang dibuat tahun 1996 menghalangi media di Myanmar untuk mendapatkan informasi secara lebih lapang karena UU ini mengharuskan media Myanmar untuk meminta izin sebelum mengimpor, memiliki, dan menggunakan peralatan berbasis komputer<sup>3</sup>.

Dengan berbagai batasan yang dibuat oleh pemerintah Myanmar, masyarakat yang menginginkan informasi independen haruslah mencari jalan alternatif untuk

---

<sup>1</sup>Diakses di <http://www.thejakartapost.com/news/2008/12/17/myanmar-journalists-face-intimidation-pressure-junta.html>

<sup>2</sup>n.n. (1962) *Printers and Publishers Registration Law*. Diambil dari Article 19 di <http://www.article19.org/data/files/medialibrary/3679/Printing-and-Publishing-Enterprise-Law-Bill.pdf>

<sup>3</sup>n.n. (1996) *Computer Science Development Law*. Diambil dari World Intellectual Property Organization di <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mm/mm012en.pdf>

mengakses informasi tersebut. Berbagai media alternatif menyediakan informasi mengenai Myanmar tanpa perlu diintervensi oleh pemerintahan junta. Media tersebut kebanyakan berpusat di luar Myanmar, karena restriksi yang sangat keras dilakukan oleh pemerintahan junta. Media-media seperti *Democratic Voice of Burma*, berpusat di Norwegia, menyediakan informasi independen dan berita yang tidak disensor oleh pemerintah junta Myanmar. Media asing lain seperti *British Broadcasting Corporation* (BBC) juga membuka layanan siaran berbahasa Myanmar untuk memberikan informasi yang bebas dari campur tangan pemerintahan junta. Salah satu media asing yang juga secara ekstensif memberikan layanan siaran bahasa Myanmar, baik siaran audio maupun visual, ialah *Voice of America* (VOA).

VOA merupakan sebuah lembaga penyiaran internasional yang berpusat di kota Washington, D.C. VOA sendiri berada dibawah wewenang pemerintahan federal Amerika Serikat (AS), dan beroperasi dibawah payung *Broadcasting Board of Governors* (BBG). VOA berdiri pada tahun 1942 sebagai sebuah badan penyiaran bernama *Office of the Coordinator of*

*Information*. Badan ini berfungsi sebagai penyedia informasi untuk tentara-tentara AS pada perang dunia II. Sejak itu, VOA kemudian berkembang sebagai lembaga penyiaran yang menyediakan layanan penyiaran radio, televisi dan internet dalam 43 bahasa dunia. Setiap minggunya, VOA memproduksi sekitar 1.500 jam pemrograman yang terdiri dari program berita dan *feature*, dan menjangkau setidaknya 123 juta orang di seluruh dunia. VOA sendiri terbentuk dengan membawa misi untuk menyiarkan informasi yang akurat, berimbang, dan tanpa batas kepada masyarakat di seluruh dunia, khususnya kepada masyarakat yang tidak mendapatkan akses atas berita-berita akurat, serta memberikan inspirasi dan harapan kepada seluruh masyarakat yang percaya akan kebebasan berpendapat dan demokrasi<sup>4</sup>.

Layanan siaran VOA berbahasa Myanmar (*VOA Burmese*) terbentuk pada 8 Juni 1943 sebagai salah satu usaha diplomasi publik AS di wilayah Indochina<sup>5</sup>. Sejak saat itu, *VOA Burmese* kemudian menjadi salah

---

<sup>4</sup>Broadcasting Board of Governors (n.d.). VOA Charter. Diambil dari Voice of America: <http://www.insidevoa.com/info/voa-charter/2322.htm>

<sup>5</sup> n.n. Diambil dari *Learn to Question*<sup>5</sup>. <http://www.learntoquestion.com/seevak/groups/2001/sites/aungsan/clinks.html>

satu media informasi alternatif ditengah tingginya intensitas sensor informasi oleh pemerintahan junta di seluruh media yang ada di dalam negeri Myanmar. Layanan VOA *Burmese* kemudian berusaha untuk melaporkan berbagai berita penting yang terjadi di dalam negara Myanmar tanpa perlu melewati sensor dari pemerintah. VOA *Burmese* memanfaatkan kelebihan mereka untuk tidak menjadi subjek sensor pemerintahan junta, yang sebelumnya telah diatur dalam beberapa UU media Myanmar. Hal ini dikarenakan wilayah cakupan yurisdiksi VOA *Burmese* yang berada di luar Myanmar, sehingga tidak menjadi subjek hukum yang dapat diadili dan dikontrol pemerintah apabila melanggar UU penyiaran dalam negeri Myanmar.

Media merupakan penggerak masyarakat dalam kaitannya terhadap isu-isu publik. Media sendiri memiliki kelebihan yaitu kemampuan untuk melipatgandakan persebaran informasi dan merepetisi informasi tersebut sehingga mampu membentuk opini publik. Pemberitaan VOA *Burmese* sendiri juga dapat menjadi sebuah motor penggerak masyarakat Myanmar dalam kaitannya sebagai kontribusi dalam proses demokratisasi Myanmar, karena

kemampuannya untuk merepetisi berita dan infromasinya melalui media penyiarannya (baik melalui Radio, TV/Visual, ataupun Internet).

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam artikel ini, penulis mencoba melihat seberapa besar peran VOA, dalam hal ini VOA *Burmese*, dalam proses demokratisasi di Myanmar selama 12 tahun ke belakang sejak Myanmar menjadi negara demokrasi dan membuka diri terhadap komunitas internasional

### **Agenda Setting Theory**

Pada tahun 1968, Dr. Maxwell E. McCombs dan Dr. Donald L. Shaw melakukan penelitian di wilayah Chapel Hill, negara bagian Karolina Utara. McCombs dan Shaw ingin melihat bagaimana berita dan informasi membentuk opini publik tertentu. McCombs dan Shaw mencoba melihat bagaimana suatu media membentuk agenda tertentu dalam editorialnya.

Penelitian yang dilakukan pada saat itu berkaitan dengan pemilu presiden yang dilaksanakan pada tahun yang sama. McCombs dan Shaw mencoba memperlihatkan bagaimana pengaruh media

massa dalam membentuk persepsi publik selama masa kampanye pemilihan presiden AS tahun 1968. Terdapat dua variabel yang diteliti oleh McCombs dan Shaw. Variabel pertama ialah Agenda Media, dimana variabel ini dijadikan variabel independen dalam penelitian tersebut. Sementara McCombs dan Shaw menentukan Agenda Publik sebagai variabel dependen. McCombs dan Shaw ingin melihat apakah ternyata Agenda Media mempengaruhi Agenda Publik yang terbentuk.

Penelitian McCombs dan Shaw ini memperlihatkan bahwa ternyata agenda berita yang di-*setting* oleh media selama masa kampanye di Chapel Hill memiliki korelasi atas prioritas isu yang terbentuk di masyarakat (Agenda Publik). Inilah yang mendasari McCombs dan Shaw untuk mengkonstruksikan *Agenda Setting Theory* (Teori Agenda Setting).

Teori Agenda Setting menjelaskan bahwa media massa mengatur agenda tertentu dalam publikasi berita dan informasinya dengan cara memprioritaskan isu-isu tertentu yang menurut mereka penting untuk diketahui. Tujuan *Agenda Setting* itu sendiri ialah bagaimana media ingin memberitahukan masyarakat apa saja yang

benar atau tidak, yang baik untuk dipikirkan maupun yang tidak, sehingga pada akhirnya sebuah konstruksi agenda publik terbentuk dan mempengaruhi masyarakat untuk mengambil tindakan/respon tertentu terhadap sebuah isu<sup>6</sup>.

Teori Agenda Setting sebelumnya berusaha untuk dijelaskan oleh Walter Lippmann, seorang jurnalis AS dan akademisi dari Universitas Harvard. Pada tahun 1922 dalam tulisannya "*Public Opinion*", Lippmann menjelaskan bahwa masyarakat tidak secara langsung merespon mengenai berbagai hal yang terjadi di sekitar mereka, namun mereka terkesan 'hidup' didalam sebuah iklim interpretasi semu yang terbentuk dari 'gambaran-gambaran kejadian' di dalam pikiran mereka. Media, menurut Lippmann, memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menyempurnakan 'gambaran-gambaran kejadian' itu, dan menjadikannya sebuah pandangan masyarakat yang jelas.

### **Globalisasi&Glokalisasi Media**

---

<sup>6</sup>McCombs, Maxwell E., dan Shaw, Donald L. (1972). The Agenda-setting Function of Mass Media. *The Public Opinion Quarterly* 36(2), 176-187. Artikel dapat diakses di [http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/PLSC541\\_Fal106/McCombs%20and%20Shaw%20POQ%201972.pdf](http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/PLSC541_Fal106/McCombs%20and%20Shaw%20POQ%201972.pdf)

Dalam membahas mengenai peran media internasional dalam dinamika politik domestik, kita perlu melihat proses globalisasi dan glocalisasi yang terjadi di dalamnya. Al-Rodhan dan Stoudmann (2006) memberikan definisi Globalisasi sebagai sebuah proses yang mencakup penyebab, tujuan, dan konsekuensi yang muncul dari integrasi antar-bangsa dan antar-budaya, baik berasal dari aktivitas manusia maupun non-manusia. Adapun lebih lanjut, globalisasi tidak muncul dalam sekelebat saat semata. Namun, globalisasi juga melibatkan pertukaran pengetahuan, informasi, dan diskursus. Dalam melihat peran media, penulis akan melihatnya melalui definisi yang diberikan oleh Giddens (1990), dimana Globalisasi merupakan proses intensifikasi dari hubungan global, yang memiliki keterkaitan dengan kejadian lokal dan dipengaruhi oleh kejadian yang terjadi di tempat yang jauh, maupun sebaliknya. Ini penting digunakan untuk melihat bagaimana *VOA Burmese* sebagai lembaga penyiaran yang membawa nilai-nilai kebebasan berekspresi dan demokrasi, memberikan *impact* dan pengaruh terhadap kondisi politik domestik, dalam hal ini, Myanmar.

Sementara itu, istilah Glocalisasi merupakan istilah yang ditermakan oleh Roland Robertson pada tahun 1990-an. Glocalisasi, yang merupakan gabungan dari Globalisasi dan Lokalisasi, merupakan karakterisasi dari interaksi global-lokal yang terjadi. Interaksi tersebut memunculkan sebuah fusi budaya yang utamanya berasal dari negara Barat. Dalam hal ini, nilai-nilai besar global yang ternyata berpengaruh dan diadaptasi menjadi kebiasaan lokal merupakan sebuah simbol dari Glocalisasi.

Glocalisasi membawa perspektif baru dalam melihat bagaimana nilai global Demokrasi menjadi sebuah terapan yang dibawa ke Myanmar melalui *proxy* media, dalam hal ini *VOA Burmese*. Insepsi nilai-nilai tersebut menjadi sebuah proses Glocalisasi yang mengusahakan demokrasi masuk ke dalam masyarakat Myanmar yang terpengaruh besar dari pemerintah junta. Myanmar yang terkesan menjadi negara sekretif mampu mendapatkan paparan nilai tersebut melalui pengaruh media asing dan memberitakan informasi yang disensor oleh pemerintah.

## **PEMBAHASAN**

### **Akses VOA Burmese di Myanmar**

Seperti dijelaskan sebelumnya, pemerintahan junta memiliki kontrol media yang sangat kuat. Pemerintahan junta sangat berusaha untuk membatasi media-media yang memberitakan informasi anti-pemerintah, dan berusaha untuk menyensor berita dan informasi sebelum diberikan ke hadapan publik.

Informasi-informasi yang jujur dan bebas dari kontrol pemerintah biasanya didapatkan oleh masyarakat Myanmar melalui berbagai media lokal dan asing yang memiliki markas di luar Myanmar. Walaupun pemerintahan junta memiliki kontrol yang sangat ketat dalam penyebaran informasi, media yang berasal di luar Myanmar sangatlah sulit dikontrol oleh dikarenakan yurisdiksi yang tidak dapat disentuh oleh pemerintah junta. Tidak terkecuali layanan siaran *VOA Burmese* yang secara rutin menyiarkan berita dan informasi dalam bahasa Myanmar. Mereka memanfaatkan kelemahan kontrol ini untuk masuk ke dalam Myanmar melalui siaran radio gelombang pendek (*Shortwave*) maupun melalui media dalam jaringan (*daring/online*). Berita dalam negeri Myanmarpun dapat disiarkan oleh *VOA Burmese* tanpa perlu melewati sensor pemerintah. Prosedur ini dikenal sebagai

*feedback loop*, dimana informasi dalam negeri diselundupkan ke luar negeri, dan disiarkan kembali oleh lembaga penyiaran yang berada di luar negeri (Danitz/Strobel, 2001).

Dengan kemampuannya memberitakan informasi tanpa adanya sensor pemerintah, *VOA Burmese* mampu menempatkan diri sebagai salah satu media yang populer di kalangan masyarakat Myanmar dan juga secara efektif mempromosikan independensi dan kejujuran dalam pemberitaan yang mereka siarkan<sup>7</sup>.

### **Proses Demokratisasi Myanmar, 2000-2012**

Usaha-usaha untuk menjadikan Myanmar negara demokrasi sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1988, dimana salah satu tokoh demokrasi Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi memimpin partai *National League for Democracy* (NLD). Pada tanggal 8 Agustus 1988, Suu Kyi memimpin gerakan massa dan demonstrasi besar yang terinspirasi oleh Mahatma Gandhi, yang dikenal sebagai *8888 Uprisings*. Ratusan ribu orang turun ke jalan untuk menuntut pemerintahan junta turun dari kekuasaan.

---

<sup>7</sup>n.n. (2008) *Freedom of the Press: Burma*. Washington D.C.: Freedom House. Diakses di <http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2008/burma>

Namun, usaha tersebut terbilang sia-sia karena pemerintahan junta yang terbukti kalah pada pemilu 1990 menganulir hasil pemilu dan memenjarakan Suu Kyi.

Tahun 2000 merupakan tahun dimana Suu Kyi kembali dipenjara sebagai tahanan rumah, setelah sebelumnya dibebaskan pada tahun 1995. Pemerintahan junta masih menganggap Suu Kyi sebagai ancaman bagi kekuasaan mereka. Berbagai pergerakan telah diupayakan oleh para aktivis Myanmar, demi pemerintahan yang bebas dari kediktatoran militer dan menjunjung tinggi demokrasi. Namun, pemerintahan junta malah menahan aktivis-aktivis untuk menghindari terjadinya protes terhadap rezim yang berkuasa<sup>8</sup>.

Di tahun 2003, atas desakan berbagai pihak internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), pemerintah Myanmar melalui *State Peace and Development Council* (SPDC) membuat rancangan pemetaan menuju pemerintahan demokrasi yang dikenal sebagai *Roadmap to Discipline-flourishing Democracy*. Ada tujuh fase yang harus dilakukan pemerintah, seperti menyusun konstitusi berdasarkan konsep

umum, membentuk kembali *National Convention*, dan menyelenggarakan pemilu yang adil. Namun banyak pihak mengkritik hal ini karena pemerintah junta tidak mampu melaksanakan beberapa fase dalam rancangan pemetaan. Fase penyelenggaraan pemilu misalnya, pemerintahan junta tidak mampu memenuhi syarat-syarat pemilu demokratis sesuai permintaan partai Suu Kyi, NLD, dalam pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintahan junta<sup>9</sup>. Di tahun 2008, SPDC melakukan usaha untuk mendemokratisasikan Myanmar melalui referendum konstitusi. Dalam referendurnya, pemerintahan junta memberlakukan pasal dimana seseorang yang menikah dengan orang non-Myanmar dilarang untuk mencalonkan diri sebagai Presiden. Ini dilihat sebagai langkah yang menjegal Suu Kyi untuk mencalonkan diri, karena suaminya yang berkebangsaan Perancis. Pemerintahan junta juga memaksakan alokasi kursi sebanyak 25% di parlemen untuk pihak militer, demi menjaga kekuasaannya dalam pemerintahan Myanmar<sup>10</sup>. Dalam referendum ini, pemerintahan junta melakukan berbagai cara

---

<sup>8</sup>n.n. (2000) *Myanmar: The institution of torture*. London: Amnesty International. [http://www.thirdworldtraveler.com/Torture/Myanmar\\_torture.html](http://www.thirdworldtraveler.com/Torture/Myanmar_torture.html)

---

<sup>9</sup>Tun, Aung Hla (2010). *Suu Kyi party splits, faction to run in Myanmar poll*. London: Reuters. Diakses di <http://www.reuters.com/article/2010/05/06/us-myanmar-politics-party-idUSTRE6455UR20100506>

<sup>10</sup>*Ibid.*

untuk mengesahkannya ke dalam konstitusi. Aktivis yang menolak dibungkam, sementara banyak surat suara telah dicurangi oleh pemerintahan junta<sup>11</sup>.

Pemilu kemudian dilaksanakan pada tahun 2010, dengan memberikan kesempatan untuk partai lain ikut dalam pemilu. Ini merupakan pemilu Multi-partai pertama yang diselenggarakan di Myanmar. Meskipun begitu, NLD memboikot pemilu ini dengan menyatakan tuntutan untuk membebaskan Suu Kyi dari tahanan rumah. Banyak pihak seperti ASEAN dan PBB juga menyatakan bahwa pemilu Myanmar 2010 tidak akan kredibel dan sah apabila Suu Kyi tidak diikutsertakan<sup>12</sup>.

Kemudian di tahun 2011-2012, atas desakan internasional yang sangat kuat, pemerintahan junta berkomitmen untuk mendemokratisasi Myanmar dengan membebaskan tahanan-tahanan politik, termasuk Suu Kyi, dan mereformasi pemerintahan menjadi lebih transparan dengan meminta asistensi ASEAN dan AS.

<sup>11</sup>n.n. (2008). *Many voices silenced as Myanmar vote campaign gets under way*. Paris: Agence France-Presse. Diakses di <http://newsinfo.inquirer.net/breakingnews/world/vie-w/20080420-131573/Many-voices-silenced-as-Myanmar-vote-campaign-gets-under-way>

<sup>12</sup>Pichai, Usa (2009). *ASEAN Foreign Ministers expect Burma to act responsively*. Diakses di <http://www.mizzima.com/news/regional/2479-asean-foreign-ministers-expect-burma-to-act-responsively-.html>

Pada pemilu 2012, Suu Kyi sebagai pemimpin NLD, akhirnya diperbolehkan untuk mengikuti pemilu dan mencalonkan diri untuk kursi parlemen. NLD akhirnya memenangkan 43 dari 45 kursi yang diperebutkan. Langkah ini dipuji berbagai pihak yang sejak lama menginginkan demokratisasi di Myanmar. Meskipun perlahan sudah diberikan kebebasan untuk memberitakan informasi tanpa perlu adanya sensor pemerintah yang eksesif.

### **VOA Burmese sebagai Media Internasional dalam Proses Demokratisasi Myanmar**

VOA, dalam hal ini *VOA Burmese*, menjadi salah satu media yang populer di kalangan masyarakat Myanmar, *VOA Burmese* cukup banyak dijangkau oleh masyarakat. Terhitung di tahun 2011, dari sekitar 50 juta penduduk Myanmar, sekitar 9 juta yang memanfaatkan layanan siaran *VOA Burmese*. Mereka memiliki akses rutin terhadap semua bentuk *platform* penyiaran *VOA Burmese* (Radio, TV dan Internet).

Jika dilihat dengan teori Agenda Setting, *VOA Burmese* memenuhi isinya dalam menyiarkan berbagai berita tentang pentingnya demokrasi bagi Myanmar. Di tahun 2007, protes anti-

pemerintah mengenai kenaikan harga bahan bak aroleh masyarakat dan para biksuberusahaditutupioleh pemerintah junta padasaatitu<sup>13</sup>.

Pemerintah berusaha menutupi fakta mengenai jumlah demonstran yang menjadi korban dari represi pemerintah. Pada masa itu, *VOA Burmese* meningkatkan frekuensi siaran mereka dua kali lipat, menjadi tiga jam sehari. Siaran yang diberikan oleh *VOA Burmese* mampu menumbuhkan riak-riak pergolakan masyarakat Myanmar yang mendengar dan mengumpulkan kekuatan, dibantu oleh diaspora Myanmar yang menyebar di seluruh dunia. Siaran *VOA Burmese* pada saat itu menunjukkan respon yang baik, dengan meningkatnya jumlah pendengar sebanyak 20%. Ini menandakan keinginan masyarakat akan informasi yang transparan dalam usaha mencapai Myanmar yang demokratis. Tokoh-tokoh Demokrasi Myanmar seperti Aung San Suu Kyi juga merasakan pengaruh media internasional, salah satunya *VOA Burmese*, dalam memberikan penyegaran dan pencerahan mengenai perlunya penerapan demokrasi di Myanmar.

Juga, 6 bulan sebelum referendum tahun 2008, *VOA Burmese* menyiarkan berita mengenai dukungan kongres AS atas pergerakan di Myanmar, atau berita mengenai permintaan utusan khusus PBB untuk membebaskan Aung San Suu Kyi yang tidak disiarkan oleh media pemerintah.

Dilihat dari jumlah berita dan informasi yang berkaitan dengan demokrasi terhitung sejak tahun 2000 hingga 2012, *VOA Burmese* menyiarkan sekitar 2182 berita dan informasi kepada masyarakat Myanmar. Jumlah tersebut cukup besar untuk media yang memiliki akses jangkauan berita minim di Myanmar, dikarenakan restriksi pemerintah terhadap *VOA Burmese* oleh pemerintah junta (Buck, 2007). Proses demokratisasi terjadi secara intensif setelah tahun 2010, ditandai dengan pembebasan beberapa tahanan politik seperti Aung San Suu Kyi. Hal ini terjadi karena adanya dorongan dari pihak asing yang sudah dijelaskan sebelumnya dan disebarkan oleh media internasional kepada masyarakat Myanmar, salah satunya *VOA Burmese*. Peran *VOA Burmese* menjadi penyebar informasi yang independen, dan berpengaruh menjadi dorongan untuk

---

<sup>13</sup>Biener, H. (2010). Radio for Peace, Democracy, and Human Rights. Diakses di <http://www.evrel.ewf.uni-erlangen.de/pesc/peaceradio-BRM.htm>

menggerakkan masyarakat sebagai bentuk demokratisasi di Myanmar.

## KESIMPULAN

Peran VOA *Burmese* terhadap proses demokratisasi di Myanmar dapat terlihat melalui usaha mereka dalam menyebarkan informasi yang disensor oleh pemerintah, serta pentingnya nilai-nilai demokrasi di masyarakat. VOA *Burmese* berperan sebagai penyedia informasi alternatif masyarakat Myanmar ditengah sensor yang ekstensif oleh pemerintahan junta. Proses demokratisasi di Myanmar secara intrinsif dipengaruhi oleh penyebaran informasi dari VOA *Burmese*, yang sudah sesuai dengan misi dari VOA *Charter*. Media dalam hal ini VOA *Burmese*, dalam konteks *Agenda Setting* telah menjalankan fungsinya. Sementara itu, nilai Demokrasi yang disebarkan melalui proses globalisasi, dan penerapannya melalui proses glokalisasi, telah dijalankan oleh VOA *Burmese* sebagai bentuk penyebaran informasi kepada masyarakat Myanmar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rodhan, N.R.F., dan Stoudman, G. (2006). *Definitions of Globalization: A Comprehensive Overview and a Proposed Definition*. GCSP.
- Biener, H. (2010). *Radio for Peace, Democracy, and Human Rights*. Diakses di <http://www.evrel.ewf.uni-erlangen.de/pesc/peaceradio-BRM.htm>
- Broadcasting Board of Governors (n.d.). VOA *Charter*. Diambil dari Voice of America: <http://www.insidevoa.com/info/voa-charter/2322.htm>
- Government of Myanmar. (1962) *Printers and Publishers Registration Law*. Diambil dari Article 19 di <http://www.article19.org/data/files/medialibrary/3679/Printing-and-Publishing-Enterprise-Law-Bill.pdf>
- \_\_\_\_\_. (1996) *Computer Science Development Law*. Diambil dari World Intellectual Property Organization di <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mm/mm012en.pdf>
- Mainsah, H. (2009). *Theories of media and globalization*. University of Oslo
- n.n. (2014). *Television, Radio, and Newspapers in Myanmar*. Diakses di [http://factsanddetails.com/southeast-asia/Myanmar/sub5\\_5e/entry-3096.html](http://factsanddetails.com/southeast-asia/Myanmar/sub5_5e/entry-3096.html)
- Smith, M. (1991). *Myanmar: The Burmese way to rack and ruin*. Index on Censorship, 20(10), 43-45. Routledge